

Kondisi Sosial Ekonomi Petani Penerima Program Cetak Sawah Rakyat di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke

Socio-Economic Conditions of Farmers Participating in the Community Rice Field Development Program in Tanah Miring District, Merauke Regency

Untari ^{1*}, Ransta L. Lekatompessy ¹

AFILIASI

¹Program Studi Ilmu Pertanian,
Fakultas Pertanian, Universitas
Musamus

²Program Studi Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas
Musamus

*Korespondensi:
untari@unmus.ac.id

Diterima: 13-08-2026
Disetujui: 06-10-2026

COPYRIGHT @ 2026 by
Agricola: Jurnal Pertanian.
This work is licensed under a
Creative Commons Attributions
4.0 International License

ABSTRACT

The People's Rice Field Development (CSR) program in Merauke Regency, implemented in Tanah Miring District, is expected to meet national food demands—which are rising alongside population growth and consumption—while simultaneously improving the socio-economic conditions of beneficiary farmers from the Food Brigade (FB) groups. This study aims to assess the local economic and social conditions of BP farmers across eight villages in Tanah Miring District. A descriptive qualitative research approach was employed. Data collection involved questionnaires and in-depth interviews with 45 respondents selected via purposive sampling, and the data were analyzed using qualitative descriptive techniques. The findings indicate that population density in the study area ranges from 2.58 to 120.86 people/km², signifying a high availability of land resources for agriculture. Most respondents work primarily as rice farmers, with household consumption expenditures generally ranging from IDR 1 million to IDR 5 million per month. Regarding the CSR program, 88% (43 respondents) expressed approval, while 12% (2 respondents) expressed disapproval. To optimize the CSR program and generate greater, sustainable socio-economic impacts—particularly for rural millennial farmers—the existing population density must be supported by adequate technology, and the BP institutional governance system requires improvement

KEYWORDS: Community rice field development (CRFD), Socio-economic, Welfare, Food security, Food brigade.

ABSTRAK

Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kabupaten Merauke yang dilaksanakan di Distrik Tanah Miring diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan konsumsi masyarakat, sekaligus meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat dari kelompok petani Brigade Pangan (BP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi lokal dan sosial masyarakat petani BP di 8 kampung di Distrik Tanah Miring. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan angket/kuesioner dan wawancara mendalam dengan responden yang berjumlah 45 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepadatan penduduk di lokasi penelitian antara 2,58 jiwa/km² sampai 120,86 jiwa/km² yang artinya bahwa ketersediaan sumber daya lahan untuk pertanian masih tinggi. Responden pada umumnya bekerja utama sebagai petani padi. Sedangkan jumlah pengeluaran rumah tangga responden pada umumnya untuk konsumsi antara 1 sebagian besar 5 juta rupiah per bulan. persepsi petani terhadap program CSR pada umumnya setuju sebesar 88% (43 responden), dan tidak setuju menjawab 12% (2 responden). Kepadatan penduduk di lokasi penelitian harus di dukung dengan dukungan teknologi yang memadai dan sistem tata kelola kelembagaan BP harus ditingkatkan agar program CSR dapat di optimalkan sehingga memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan khususnya untuk petani-petani milenial di pesedaan.

KATA KUNCI: Cetak sawah rakyat (CSR), Sosial ekonomi, Kesejahteraan, Ketahanan pangan, Brigade pangan.

1. PENDAHULUAN

Isu global yang saat ini menjadi salah satu isu strategis semua negara di dunia yaitu akan adanya ancaman krisis pangan dunia yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan produksi pangan (Sastrawan et al., 2019). Kerawanan pangan suatu negara dapat disinyalir menjadi cermin dari pembangunan nasional karena tidak ada satu negara yang dapat berkembang dan maju sebelum mewujudkan ketahanan pangan negaranya (Ikwanto et al., 2019). Tantangan Indonesia saat ini adalah tingginya tingkat konsumsi pangan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu, meningkatnya daya beli masyarakat dan selera konsumen akan bahan pangan khususnya konsumsi beras (Ikwanto et al., 2019). Konsekuensi untuk menghadirkan ketersediaan pangan secara kuantitas berdampak pada alih fungsi lahan yang dipergunakan untuk cetak sawah baru untuk lahan pertaniannya khususnya untuk produksi beras (Sastrawan et al., 2019). Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia untuk mensuplai kebutuhan karbohidrat dalam tubuh manusia selain jagung, singkong, umbi-umbian dan sagu (Suleman et al., 2026). Wilayah yang memiliki produktifitas tinggi seperti di Pulau Jawa dan kota-kota besar yang menjadi pusat pembangunan yang lahannya memiliki produktifitas tinggi namun alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan lain yang menyebabkan lahan pertanian dari waktu ke waktu mengalami penurunan (Mustapa et al., 2019).

Pemerintah membuat kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan, yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan; peraturan Pemerintah nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan; Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan Pangan dan Gizi. Namun kebijakan-kebijakan pemerintah tidak serta merta sudah bisa mewujudkan program ketahanan pangan nasional tanpa ketersediaan sumber daya utama yaitu lahan pertanian yang memadai secara kualitas dan kuantitas luasan lahan. (Lestari et al., 2023).

Upaya yang dilakukan pemerintah sampai saat ini belum seluruhnya menghentikan Indonesia menghentikan Impor beras dari luar negeri. Laporan Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021-2025 mencatat bahwa Indonesia pada Tahun 2021 jumlah beras yang di import berjumlah 407.741,4 ton, Tahun 2022 429.207,3 ton, Tahun 2023 berjumlah 3.062.857,6 ton, Tahun 2024 berjumlah 4.519.420,6 ton, dan Tahun 2025 berjumlah 450.734,0 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa produksi beras di Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi konsumsi dalam negeri sehingga masih harus mengimport beras. Kondisi tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi industri, perumahan atau penggunaan lain (Riandjumahge et al., 2017). Upaya pemerintah untuk mengatasi krisis pangan nasional dan permasalahan ketersediaan lahan salah satunya program cetak sawah rakyat (Rela & Agustina, 2026). Salah satu wilayah yang di Indonesia yang diharapkan menjadi sentra produksi pangan dan dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional yaitu Kabupaten Merauke.

Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan basah seluas 1.937.291 Ha dan potensi lahan kering seluas 554.531 ha. Potensi lahan yang ada di Merauke menjadi salah satu faktor kebijakan pemerintah menetapkan Merauke sebagai lumping pangan nasional (Riandjumahge et al., 2017). BPS kabupaten Merauke tahun 2025 melaporkan bahwa pada Tahun 2024 luas tanam dan luas panen tanaman padi sawah dan padi ladang seluas 66.951,40 Ha. Data menunjukkan bahwa terdapat 4 Distrik yang memiliki luas tanam dan luas panen terluas yaitu distrik Kurik seluas 22.132,50 Ha, Distrik Tanah Miring 20.171.75 Ha, Distrik Malind seluas 11.681,50 Ha, dan Distrik Semangga seluas 11.060, 75 Ha. Keempat Distrik tersebut merupakan sentra produksi padi di Kabupaten Merauke dari 22 Distrik yang di Merauke. Jumlah produksi padi Kabupaten Merauke dari 17 distrik yang terdapat budidaya padi berjumlah 342.539,52 Ton, dengan produktifitas lahan rata-rata 5,12 ton/Ha (BPS, 2025). Kabupaten Merauke untuk mewujudkan swasembada pangan nasional dilakukan program cetak Sawah Rakyat (CSR). Program cetak Sawah rakyat (CSR) merupakan program pemerintah sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan produksi pangan nasional melalui pembukaan lahan baru yang terencana dan berkesinambungan (Rajagukguk et al., 2026). Pengelolaan lahan CSR di masyarakat dilakukan oleh masyarakat yang masuk dalam kelembagaan tani yaitu Brigade Pangan (BP). Brigade pangan dibentuk untuk mewujudkan ketahanan pangan yang di dukung dengan sistem pertanian modern yang di dukung oleh pemerintah (Ramija et al., 2025). Brigade pangan di bentuk di Indonesia di 12 Provinsi dan salah satunya di Provinsi Papua Selatan Khususnya di Merauke (Ramija et al., 2025).

Merauke merupakan sentra produksi beras dan sudah dapat memenuhi konsumsi lokal (Pramudia et al., 2026). Untuk itu Merauke ditetapkan sebagai sentra produksi pangan khususnya padi karena masih memiliki

potensi lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk mendukung budidaya pertanian tanaman pangan nasional. BPS melaporkan bahwa Distrik Tanah Miring memiliki produktifitas lahan antara 4,95 sampai 5,83 ton/ha(BPS, 2025). Untuk meningkatkan produksi padi di Kabupten Merauke, pemerintah menetapkan Tanah Miring sebagai salah satu wilayah yang menerima program CSR. Distrik Tanah Miring sebelum menerima program CSR, pada Tahun 2014 sudah menerima program cetak sawah baru seluas 150 Ha. Tahun 2015 Tanah Miring mendapat alokasi program pembukaan cetak sawah seluas 1.290 Ha dari total luas cetak sawah di Kabupaten Merauke yaitu seluas 2.115 Ha yang di kelola oleh 919 petani. Dalam beberapa kajian mengungkapkan bahwa program cetak sawah selain untuk menjaga ketahanan pangan, namun di harapkan mampu mendorong pertumbuhan keberlanjutan perekonomian masyarakat sebelum adanya program(Rela & Agustina, 2026).

Kajian empiris terkait program cetak sawah sudah dilakukan pada beberapa fokus penelitian yaitu analisis kesesuaian lahan pada lahan cetak sawah(Suleman et al., 2026), evaluasi program cetak sawah(Dahiri, 2018; Hasril et al., 2021; Lestari et al., 2023; Prayoga et al., 2025; Sastrawan et al., 2019; Situmorang, 2024), persepsi masyarakat(Sastrawan et al., 2019), analisis pendapatan masyarakat(Riandjumahge et al., 2017) Mengacu pada kondisi empiris di dalam teori yang melatar belakangi kajian ini, maka terdapat gap penelitian yang layak untuk di kaji dalam penelitian ini yaitu kajian “Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Petani Penerima Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Distrik Tanah Miring” sangat penting di lakukan untuk mengetahui sejauh mana respon petani penerima program cetak sawah. Tujuan penlitian yaitu mengetahui kondisi ekonomi lokal dan sosial petani BP di 8 Kampung Distrik Tanah Miring.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Distrik tanah Miring Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Distrik Tanah Miring merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Merauke sebagai sentra produksi pangan khususnya beras. Kemampuan lahan yang dimiliki Distrik tanah Miring mencapai 11.124,192 Ha dan tersebar di 14 Kampung. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Desember Tahun 2025.

Design penelitian menggunakan pendekatan penelitian Mixed-method deskriptif dengan menggunakan metode penelitian survey(Creswell J W, 2009). Penelitian mengkaji secara empiris kondisi sosial dan ekonomi kelompok masyarakat menerima dampak program cetak sawah rakyat. Kelompok Masyarakat yang akan dikaji terdapat di 8 kampung yang ada di Distrik tanah Miring yaitu Kampung Amunkay, Kampung Hidup Baru, kampung Ngguti Bob, Kampung Sarmayam Indah, Kampung Sumber harapan, Kampung Tambat, Kampung Kamangi, dan Kampung Soa.

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari objek yang di kaji yaitu kelompok masyarakat petani di 8 kampung yang menerima program cetak sawah rakyat dari pemerintah dengan sumber pendanaan APBN. Data primer yang dikumpulkan dari responden terdiri dari informasi tentang kondisi perekonomian lokal, kondisi sosial budaya yang dibatasi pada komponen kesehatan masyarakat dengan melihat status kepemilikan rumah, kondisi sistem sanitasi lingkungan (Kondisi MCK, ketersediaan sumber air bersih, dan sistem pengelolaan sampah rumah tangga). Selain itu dalam kajian kualitatif ini, menyajikan persepsi masyarakat secara umum terhadap program CSR yang diharapkan oleh kelompok petani penerima program.

Populasi penelitian adalah kelompok Brigade Pangan yang tersebar di 8 Kampung yang menjadi sampel wilayah yang diamati dalam penelitian ini. Jumlah keanggotaan dalam setiap kelompok Brigade pangan yaitu 15 orang per kelompok. Jumlah BP Distrik Tanah Miring berjumlah 37 kelompok, sehingga jumlah petani yang terlibat secara langsung dalam program BP yaitu 555 petani padi. Jumlah responden penelitian berjumlah 45 responden petani BP dyang tersebar 8 kampung di Distrik Tanah Miring yang berjumlah 45 responden. Metode penarikan jumlah sampel responden petani menggunakan rumus Slovin dengan tingkat error 15%. Penentuan responden petani menggunakan metode *random sampling* dari 555 jumlah petani padi yang tergabung dalam Brigade Pangan di lokasi penelitian. Kriteria responden penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu petani yang masuk dalam kelompok Brigade Pangan dan mengolah lahan CSR.

Teknik pengambilan data di lakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam yang dianalisis secara deskriptif, dan menggunakan angket atau kuisioner yang di susun berdasarkan indikator sosial dan ekonomi masyarakat yang diamati. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif yang disajikan dalam bentuk frekuensi, median dan presentase untuk dan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden berdasarkan aspek sosial yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan petani yang tergolong dalam brigade pangan dalam wilayah yang diamati. Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 1., menunjukkan bahwa umur responden sebagian besar masih berumur produktif yaitu umur di dominasi umur produktif yaitu umur 25-64 Tahun sebesar 93,3% dari total responden, sedangkan 6,7% umur petani diatas 64 tahun. Data tersebut menyimpulkan bahwa petani yang sudah tidak dalam kategori umur produktif masih bekerja sebagai petani padi sawah. Sedangkan data jenis kelamin responden yang disajikan tercatat bahwa 73,3% berjenis kelamin laki-laki dan 26,7% berjenis kelamin perempuan. Tabel 1., juga menyajikan data tingkat pendidikan petani responden penerima program cetak sawah di Distrik Merauke pada umumnya di dominasi pendidikan yang rendah yaitu petani 20% hanya lulusan SD dan 24% hanya tamat SMP, bahkan ada responden yang tidak bersekolah 8,9%. Data karakteristik responden tersebut dapat menggambarkan kondisi tantangan akan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan khususnya budidaya tanaman padi sawah yang didukung oleh pemerintah melalui program cetak sawah baru untuk meningkatkan produksi pangan guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. Data karakteristik responden penelitian berdasarkan umur hampir sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa umur dan pendidikan petani yang terlibat dalam program cetak sawah baru di Provinsi Jambi pada umumnya masih berada pada usia produksi yaitu dengan kisaran umur antara 26-50 tahun dan tingkat pendidikan petani responden hanya 6-9 tahun artinya bahwa sebagian besar petani hanya lulusan SD dan SMP (Lestari et al., 2023).

Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan Petani Responden Penelitian

Variabel	Ukuran/Volume	Jumlah Responden	Persentase (%)
Umur (tahun)	25-64	42	93,3
	> 65	3	6,7
Jumlah Responden		45	100
Jenis kelamin	Laki-laki	33	73,3
	Perempuan	12	26,7
Jumlah Responden		45	100
Tingkat pendidikan	Tidak Sekolah	4	8,9
	Tamat SD	9	20
	Tidak Tamat SD	5	11,1
	Tamat SMP/ sederajat	11	24,4
	Tidak Tamat SMP/ sederajat	4	8,9
	Tamat SMA/ sederajat	2	4,4
	Tidak Tamat SMA/ sederajat	8	17,8
	D3	1	2,2
	PT (Sarjana)	1	2,2
Jumlah Responden		45	100

Produksi dan produktifitas lahan pertanian akan terwujud bukan saja ditentukan dari faktor sarana dan prasarana fisik namun juga ditentukan dari kualitas sumber daya manusia. Pelaku utama dalam pembangunan pertanian dalam hal ini program cetak sawah untuk tanaman padi di Distrik tanah Miring yaitu petani. Umur petani akan sangat mempengaruhi produktifitas petani dalam memanfaatkan sumber daya pertanian yaitu mengolah lahan, mengoperasikan teknologi pertanian, dan pengelolaan sumberdaya pertanian lainnya agar produksi dan produktifitas dapat tercapai. Demikian pula, tingkat pendidikan petani akan mempengaruhi kemampuan petani dalam adopsi informasi dan teknologi pertanian. Peningkatan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan petani dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dibutuhkan metode khusus yang tepat untuk mendukung percepatan pertumbuhan usahatani (Lestari et al., 2023).

3.2. Demografi

Pembangunan pertanian membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen membangun sektor pertanian berkelanjutan (Susilowati, 2016). Pembangunan pertanian pada umumnya terjadi kawasan pedesaan. Pembangunan ekonomi pedesaan digerakkan oleh sektor pertanian sampai terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hastuti & Santoso, 1994). Tolak ukur untuk melihat Keberhasilan pembangunan yaitu aspek kesehatan, pendidikan, dan perumahan (Christanto, 2015).

Distrik Tanah Miring merupakan salah satu distrik di Kabupaten Merauke yang memiliki 14 Kampung dan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Selain itu, Tanah Miring merupakan salah sentra produksi pangan di Merauke. Produksi pangan khususnya padi menjadikan Tanah Miring menjadi wilayah kedua setelah Distrik Kurik sebagai wilayah penghasil padi di Kabupaten Merauke (BPS, 2025). Keberhasilan pembangunan pertanian di pedesaan harus di dukung dengan kondisi demografi yang mendukung. Kondisi demografi Distrik Tanah Miring dalam kajian ini yaitu kepadatan penduduk.

3.2.1. Karakteristik Wilayah Penelitian

Penduduk adalah orang mendiami suatu wilayah yang terikat dengan aturan-aturan yang berlaku dan ada interaksi satu sama lainnya. Laju pertumbuhan penduduk akan menjadi faktor penyebab tingginya tekanan terhadap daya dukung lahan (Jayadi et al., 2018). Faktor kependudukan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakatnya, seperti masalah sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan (Yunianto, 2021). Wilayah dengan kepadatan rendah memiliki peluang pengembangan komoditas ekstensif atau pemanfaatan lahan yang lebih luas per keluarga. Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan sarana prasarana sesuai jumlah penduduk agar kegiatan ekonomi berjalan optimal. Analisis kepadatan penduduk juga membantu menentukan prioritas intervensi program pemerintah dan skema pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Data jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di wilayah penelitian disajikan pada Tabel 1., sebagai berikut:

Tabel 1., menunjukkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada setiap kampung/kelurahan di wilayah penelitian. Luas total wilayah penelitian yang mencakup 8 kampung yaitu 760,06 km² dengan jumlah penduduk 10.397 jiwa. Kepadatan rata-rata sebesar 13,68 jiwa/km². Adapun kampung memiliki kepadatan yang tinggi seperti Kampung Kamangi dengan kepadatan 120,86 jiwa per km². Ada pula kampung yang memiliki kepadatan rendah seperti Tambat dengan 2,58 jiwa per km². Data ini memberikan gambaran tentang sebaran penduduk yang tidak merata dan membantu mengidentifikasi wilayah dengan potensi tenaga kerja yang besar di Distrik Tanah Miring khususnya untuk tenaga kerja petani untuk mendukung program cetak sawah rakyat.

Tabel 2. Kepadatan Penduduk di Wilayah Penelitian Distrik Tanah Miring, Tahun 2025.

No.	Desa/ Kampung	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Amunkay	245,28	2042	8,33
2.	Hidup Baru	41,66	1923	46,16
3.	Kamangi	5,80	701	120,86
4.	Ngguti Bob	25,83	1046	40,50
5.	Sarmayam Indah	113,75	1123	9,87
6.	Soa	61,05	648	10,61
7.	Sumber Harapan	21,60	2263	104,77
8.	Tambat	245,09	633	2,58

Sumber: Distrik tanah Miring dalam Angka, Tahun 2025.

Terdapat 8 Kampung yang menjadi lokasi penelitian yaitu Kampung Amunkay, Kampung Hidup Baru, Kampung Ngguti Bob, Kampung Sarmayam Indah, Kampung Sumber Harapan, Kampung Tambat, Kampung Kamangi, dan Kampung Soa. Berdasarkan data luas lahan dan kepadatan penduduk di 8 Kampung di Distrik Tanah Miring, pada umumnya lokasi yang menerima program cetak sawah di 8 kampung masih memiliki

potensi lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian. Data 8 kampung tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis kampung berdasarkan dari mayoritas penduduk yang tinggal. Untuk Kampung Kamangi, Soa, dan Tambat adalah kampung lokal artinya bahwa sebagian masyarakat yang tinggal adalah masyarakat lokal atau masyarakat Asli Papua. Sedangkan Kampung Amunkay, Hidup baru, Ngguti Bob, Sarmayam Indah, dan Kampung Sumber Harapan adalah kampung transmigrasi yang di dominasi oleh suku pendatang yang datang transmigrasi dari berbagai Suku diluar Pulau Papua. Tingkat kepadatan penduduk di 8 kampung sebagai lokasi pembukaan cetak sawah akan menjadi salah satu sumber daya yang akan mengelola lahan CSR di masing-masing Kampung. Namun terdapat hasil kajian bahwa peningkatan jumlah lahan pada program cetak sawah baru terdapat banyak masyarakat yang belum bersedia untuk mengolah, artinya tenaga kerja penggarap yaitu padi menjadi faktor penting untuk keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui program cetak sawah (Situmorang, 2024)

3.3. Kondisi Perekonomian Lokal

Distrik Tanah Miring merupakan bagian dari Program Transmigrasi tahun 1980-an, di mana paket lahan yang diterima oleh para Transmigran adalah: Lahan Pekarangan dengan luas 0,25 hektar (25 x 100 meter) yang terletak di tengah-tengah kampung di mana rumah-rumah dan fasilitas umum berada, Lahan Usaha (LU) – 1 dengan luas 0,75 hektar (75 x 100 meter) yang terletak di antara Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha (LU) -2, serta Lahan Usaha (LU) – 2 dengan luas 1 hektar (100 x 100 meter) yang terletak di perbatasan kampung, sehingga total lahan yang diterima masing-masing transmigran adalah sebesar 2 hektar.

Mata pencaharian utama masyarakat di di 8 Kampung yang menjadi sampel pengamatan untuk program CSR yaitu kampung Amunkay, Hidup Baru, Kamanggi, Ngguti Bob, Sarmayan Indah, Soa, Sumber Harapan, dan Kampung Tambat adalah bekerja di sektor pertanian atau sebagian besar adalah petani dengan status kepemilikan lahan sebagai petani pemilik di lahan-lahan eks-Transmigrasi. Pada umumnya masyarakat di lokasi pengamatan komoditas pertanian yang menjadi unggulan masyarakat sesuai potensi lahan yaitu sebagai petani padi sawah. Untuk menunjang sumber pendapatan keluarga, petani selain membudidayakan padi, juga membudidayakan tanaman hortikultura seperti cabai, dan sayur-sayuran yang usia produksinya lebih pendek. Selain petani pemilik, Di Distrik Tanah Miring juga masih ada petani penggarap, yang mana lahan yang di olah menyewa pada pemilik lahan yang lahannya tidak di garap. Masyarakat transmigrasi atau masyarakat lokal di Tanah Miring sangat antusias dengan Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) 2025. Menurut masyarakat manfaat langsung diperoleh dari program cetak sawah kedepan dapat menambah luasan lahan sehingga dapat mendukung pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga meningkat. Hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Botto yang menganalisis pendapatan petani peserta program cetak sawah baru dan sawah lama menyimpulkan bahwa pendapatan petani lama lebih tinggi di bandingkan petani yang menggarap dilahan cetak sawah baru (Nurdin, 2021). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa program cetak sawah yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kepulauan Riau belum optimal, artinya bahwa belum memberikan kontribusi maksimal untuk kesejahteraan masyarakat setempat (Hasril et al., 2021). Harapan dari program cetak sawah pada dasarnya dapat meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan tidak merusak lingkungan. Namun kenyataannya pendapatan petani yang diperoleh peningkatannya belum bisa memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan (Mustapa et al., 2019).

Hasil wawancara di lapangan, dari 45 responden di 8 Kampung di Tanah Miring, terdapat petani yang memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi petani yaitu bekerja sebagai tukang bangunan, nelayan, usaha jual galian C, sensor kayu, karyawan swasta, beternak unggas dan ruminansia, serta berdagang. Keempat kampung tersebut pun cukup berkembang, terlihat dari rumah-rumah warga yang sudah tidak nampak lagi rumah-rumah standar transmigrasi, sekarang rumah-rumah warga bervariasi ukurannya mulai 20 m² hingga 90-an m². Sedangkan tanah pekarangan sebesar lahan pekarangan transmigrasi, yakni sebesar 0,25 hektar (25 x 100 meter). Kondisi ekonomi berbeda yang di tunjukkan oleh masyarakat penerima program cetak sawah di Provinsi Jambi bahwa masyarakat memiliki pekerjaan diluar sektor pertanian yaitu sebagai buruh, guru, peternak, perkebunan, ojek, wiraswasta dan pekerjaan lainnya (Lestari et al., 2023). Pada kenyataannya kondisi keluarga di pedesaan akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi. Kebijakan pembangunan di desa harus dapat mengintervensi hadirnya peluang pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hastuti & Santoso, 1994).

Berdasarkan tabel 3., menunjukkan bahwa 40 responden yang memberikan jawaban pengeluaran rumah tangga di simpulkan bahwa sebagian besar keluarga petani di lokasi pengeluaran per bulan masih berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- yang diperuntukkan untuk pengeluaran pangan yang tidak diproduksi di kebun atau sawah sendiri dan untuk pengeleluaran pendidikan anak dan kesehatan. Hasil penelitian

ini masih sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan di Jawa Barat bahwa pengeluaran rata-rata rumah tangga petani padi per bulan berjumlah Rp. 2.795.000 per bulan, dimana pengeluaran tertinggi ada pada pengeluaran untuk pangan yaitu Rp. 1.667.500/bulan, sedangkan pengeluaran non pangan berjumlah Rp. 1.128.500/bulan (Fatimah & Syamsiyah, 2018). Penelitian lain juga menunjukkan fenomena yang sama yaitu pengeluaran rumah tangga petani padi di Aceh Utara bahwa pendapatan rumah tangga untuk pangan dan non pangan per bulan berjumlah Rp. 2.240.973.000 per bulan (Martina et al., 2021).

Pengeluaran rumah tangga petani di Distrik Tanah Miring pada umumnya digunakan untuk belanja konsumsi. Bahan makanan yang di produksi petani untuk bisa di konsumsi masih membutuhkan bahan penunjang lainnya yang harus di beli dan masih mendominasi pengeluaran keluarga tani. Selain untuk makan, pengeluaran rumah tangga juga digunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, listrik, dan pembelian air mineral atau tengki saat musim kemarau.

Tabel 3. Pengeluaran Keluarga/bulan di Kampung Pengamatan Distrik Tanah Miring.

No.	Jumlah Pengeluaran (Rp)	Responden (Orang)
1	Kurang dari 1.000.000	6
2	1.000.000 s/d 1.500.000	10
3	1.500.000 s/d 2.000.000	8
4	2.000.000 s/d 2.500.000	3
5	2.500.000 s/d 3.000.000	8
6	3.000.000 s/d 4.000.000	3
7	4.000.000 s/d 5.000.000	1
8	Lebih dari 5.000.000	1

Sumber: Data Primer diolah, 2025.

3.4. Kondisi Sosial Budaya

Distrik Tanah Miring merupakan bagian dari Program Transmigrasi tahun 1980-an yang berasal dari Pulau Jawa sehingga pada umumnya penduduk kampung Amunkay, Hidup Baru, Ngguti Bob, sarmayan Indah, dan Sumber Harapan, adalah etnis Suku Jawa. Sedangkan Kampung Kamangi, Kampung Tambat, dan Kampung Soa di dominasi oleh masyarakat Asli Papua dari Suku Muyu, Auyu, dan Mandobo. Masyarakat eks-transmigran ini hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua.

Situasi sosial kemasyarakatan di delapan kampung tersebut berjalan dengan harmonis, dimana antar penduduk saling mengenal dan akrab. Gangguan keamanan dan ketertiban kadang-kadang atau bahkan hampir jarang sekali terjadi, walaupun ada jenis gangguan keamanan dan ketertiban hanya kasus pencurian, dan mabuk-mabukan yang intensitasnya kadang-kadang dan tidak sering terjadi kasus seperti itu. Konflik atau perselisihan pun hampir sangat jarang terjadi. Kasus konflik atau perselisihan yang pernah terjadi di kampung transmigrasi yaitu konflik hewan peliharaan yang injak tanaman atau makan tanaman. Konflik terjadi dengan sesama masyarakat pendatang. Jika ada gangguan keamanan dan ketertiban serta jika ada konflik atau perselisihan akan diselesaikan oleh Kepala Kampung, Ketua RT/RW, Tokoh Agama, atau tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dui tuakan di kampung masing-masing.

Perselisihan atau konflik di kawasan Distrik Tanah Miring pada umumnya masih aman. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di delapan Kampung yang menjadi lokasi kajian menunjukkan bahwa potensi konflik kadang terjadi. Konflik yang terjadi antara tetangga yang di dominasi yaitu masyarakat pendatang. Hal tersebut karena wilayah pengamatan pada umumnya di area transmigrasi yang di dominasi oleh suku yang datang dari luar Papua yaitu Suku Jawa. Beberapa faktor yang memicu konflik di wilayah perkampung di Tanah Miring yaitu Minuman keras, salah paham antar warga, masalah ternak makan tanaman di kebun atau lahan pertanian, serta terdapat masalah perebutan lahan antara pendatang dan penduduk Asli Papua. Dalam program cetak sawah yang mendapat respon sangat baik dari masyarakat masyarakat yang mau ikut terlibat dalam kegiatan cetak sawah, konflik yang perlu di sikapi dengan baik yaitu konflik yang disebabkan oleh hewan ternak. Beternak merupakan salah satu pekerjaan sampingan petani di Kampung di Distrik Tanah Miring. Ternak yang di usahakan yaitu ternak sapi dan ternak unggas. Ternak yang dapat menimbulkan konflik yaitu ternak sapi. Sistem beternak sapi dengan sistem di umbar atau di ikat. Ternak yang di lepas atau di ikat namun masih berpotensi untuk putus tali atau terlepas akan masuk ke lahan pertanian dan memakan tanaman atau bahkan menginjak-i-jak tanaman sehingga petani merasa di rugikan. Lahan pertanian di Distrik tanah Miring pada umumnya tidak di pagar sehingga sanga berpotensi untuk di masuki hewan ternak yang di lepas liat atau tidak di kandangkan. Untuk mengatawi konflik tersebut, diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkandangkan ternak agar tidak menjadi konflik antar warga yang disebabkan oleh

hewan ternak. Selain itu, terdapat potensi konflik yang perlu mendapat perhatian walaupun jarang terjadi yaitu masalah perebutan lahan antara pendatang dan masyarakat lokal.

Status lahan yang di gunakan untuk program CSR di Distrik Tanah Miring pada umumnya adalah lahan yang hutan sekunder dengan status lahan milik pribadi dan lahan adat. Di Kampung Sarmayam Indah lahan yang buka untuk program CSR adalah lahan pribadi yang belum bersertifikat. Lahan sudah di perjual belikan oleh lahan pemilik ulayat tanah kepada masyarakat pendatang. Sedangkan lahan di Kampung Hidup Baru yang di gunakan untuk lahan CSR adalah lahan milik masyarakat transmigrasi atau pendatang dan bersertifikat. Lahan CSR yang masih berstatus lahan adat pada umumnya di miliki oleh suku asli Merauke yaitu Suku marind. Beberapa suku yang memiliki lahan CSR di Distrik Tanah Miring yaitu Marga Ndiken, Mahuze, Samkakay, Basik-basik, Gebze, dan Marga Kaize. Proses pembukaan lahan CSR baik yang sudah berstatus lahan pribadi yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat (pelepasan adat) atau lahan yang masih di status lahan adat pada umunya di depalan kampung tidak ada yang bermasalah dan memiliki ulayat tanah mendukung kegiatan CSR dan bahkan menjadi bagian dalam kegiatan cetak sawah rakyat sebagai petani penggarap. Namun terdapat Kampung yang mana bermasalah karena status lahan yang rencana akan dilakukan pembukaan lahan status lahan sudah jual diatas jual dan kepemilikan tidak jelas. Upaya menentukan titik baru di lakukan oleh OPD terkait namun belum selesai. Dalam kajian evaluasi program cetak sawah yang dilakukan di Jambi, mengungkapkan bahwa status kepemilikan lahan menjadi kendala utama seperti tidak memiliki dokumen administrasi yang sah yang dipengaruhi oleh kebiasaan dan adat istiadat(Lestari et al., 2023)

Di lokasi kajian, di tinjau dari kegiatan kebudayaan yang berlangsung di tengah masyarakat sebelum dilakukan program CSR pada umumnya tidak ada kegiatan kebudayaan yang rutin dilaksanakan yang berpotensi akan mengganggu program cetak sawah rakyat kedepan. Wilayah pengamatan di delapan Kampung yang menjadi lokasi kajian terdapat dua kampung lokal yang memiliki nilai situs bersejarah berupa Batu keramat yaitu di Kampung Soa/Senayu yaitu berupa Batu keramat yang memiliki nilai budaya untuk suku Marind. Sedangkan kampung Non lokal atau kampung transmigrasi tidak terdapat peninggalan sejarah di wilayah lahan CSR.

3.5. Persepsi Masyarakat Secara Umum terhadap Program Cetak Sawah Rakyat (CSR)

Eksistensi pertanian tetap harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penurunan produksi pertanian khususnya produksi pangan yang menjadi kebutuhan mendasar hajat hidup masyarakat(Situmorang, 2024). Persepsi masyarakat di Kampung Amunkay, Hidup Baru, Ngguti Bob, Sarmayan Indah, Sumber Harapan, Tambat, Kamanggi dan Kampung Soa Distrik Tanah Miring terhadap program cetak sawah rakyat 88% (43 responden) masyarakat setuju terhadap program cetak sawah, 12% (2 responden) lainnya tidak setuju. Kampung yang responnya tidak setuju terhadap rencana pembukaan lahan cetak sawah rakyat (CSR) yaitu di Kampung Kamangi. Masyarakat di kampung Kamanggi di huni oleh masyarakat asli papua yaitu suku Muyu, Auyu dan Mandobo. Masyarakat yang mau tanam padi hanya sedikit dan di dominasi dari suku Muyu saja. Sedangkan di kampung lainnya tidak masalah dengan program sawah dan bersedia menjadi bagian dari program cetak sawah. Untuk itu, menurut ketua Gapoktan harus ada pembinaan secara intensif untuk meningkatkan motivasi masyarakat menjadi petani dan mengharap penambahan lahan baru melalui program CSR di wilayah mereka karena akan menambah luas tanam mereka. Selama ini biaya pembukaan lahan yang masih hutan membutuhkan biaya yang mahal. Untuk pembukaan lahan yang masih hutan atau lahan yang belum terhadap membutuhkan eksavator untuk menumbangkan pohon dan mencabut akar-akar pohon.

Masyarakat merespon setuju jika pengelolaan cetak sawah untuk pembukaan lahan di lakukan oleh pemerintah karena masyarakat tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan pembukaan lahan yang masih di tumbuhi pohon besar seperti kayu bus putih, rahay dan pohon gebang. Keterlibatan masyarakat dalam program cetak sawah dalam bentuk sebagai petani penggarap dengan terlibat dalam kelompok Brigade Pangan (BP). Salah satu permasalahan pembangunan yaitu sumber daya manusia. Fenomena penuaan petani dan berkurangnya petani muda semakin meningkat yang disebabkan oleh persepsi masyarakat terhadap pekerjaan sebagai petani kurang bergengsi, beresiko tinggi, kurang memberikan jaminan, tingkat stabilitas, dan kontinuitas pendapatan; rata-rata penguasaan lahan sempit; diversifikasi usaha nonpertanian dan industri pertanian di desa kurang/tidak berkembang; suksesi pengelolaan usaha tani rendah; belum ada kebijakan insentif khusus untuk petani muda/pemula; dan berubahnya cara pandang pemuda di era postmodern seperti sekarang(Susilowati, 2016). Pemerintah melalui kementerian pertanian membentuk Brigade Pangan (BP) yang dibentuk dari generasi milenial yang di harapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja petani yang di bentuk pemerintah dengan memberikan dukungan fasilitas sarana prasarana yang memadai(Ramija et al., 2025). Hal tersebut sejalan dengan kajian yang mengkaji respon masyarakat dari program cetak sawah bahwa

masyarakat mendukung program cetak sawah karena masyarakat mendapatkan bantuan untuk mengolah tanah, penanaman, pemberantasan hama penyakit tanaman, pembinaan dan pendampingan dari pemerintah (Mustapa et al., 2019). Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya petani dapat dilakukan melalui program pendidikan dan latihan, penataran-penataran dan kegiatan lainnya. Selain itu, menjamin keberadaan petugas penyuluh lapangan (Ikwanto et al., 2019).

Besar harapan masyarakat dengan adanya program CSR dalam menambah luas lahan garapan dan dapat membantu ekonomi keluarga sehingga kesejahteraan keluarga meningkat. Sebagian masyarakat tertarik untuk membuka usaha setelah program CSR berjalan yaitu usaha bengkel usaha tani, jasa transportasi angkut hasil panen dari lahan, dan peluang untuk menjual bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar mesin pertanian. Upaya pemerataan pembangunan melalui program cetak sawah yang dilakukan pemerintah, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh program telah berjalan dan dapat mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan dalam implementasi program (Hasril et al., 2021).

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima dampak program cetak sawah Rakyat (CSR) di 8 Kampung Distrik Tanah Miring yaitu Kampung Amunkay, Hidup Baru, Kamanggi, Ngguti Bob, Sarmayan Indah, Soa, Sumber Harapan, dan Kampung Tambat terdiri 5 kampung transmigrasi dan 3 kampung lokal yang pada umumnya memiliki pekerjaan utama sebagai petani dan menjadi anggota kelompok brigade pangan (BP). Kepadatan penduduk di 8 kampung tersebut pada umumnya kepadatan antara 2,58 jiwa/Km² – 120,86 jiwa/Km². Kondisi menggambarkan bahwa wilayah masih tersedia lahan yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Penuh harapan masyarakat dari program CSR dapat menjadi peluang membuka usaha baru dari usaha penjualan bahan bakar minyak, usaha angkutan padi, bengkel, serta usaha lainnya yang bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. respon masyarakat yang masuk dalam kelompok Brigade Pangan (BP) 88% setuju dengan adanya program cetak sawah rakyat karena pemerintah mendukung dengan program bantuan mekanisasi pertanian modern untuk mempermudah pengelolaan lahan dan pasca panen. Sedangkan 12% responden petani kurang setuju adanya program cetak sawah terutama masyarakat lokal karena pada umumnya tidak semua orang asli Papua bisa bertani sehingga sulit menggerakkan masyarakat untuk konsisten menggarap lahan cetak sawah. Kesimpulan dari hasil kasian tersebut, diharapkan pemerintah melakukan evaluasi program CSR secara menyeluruh untuk melihat keterlaksanaan program dengan peningkatan program penyuluhan pertanian dan upaya perbaikan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi secara menyeluruh agar program CSR dapat berkelanjutan dan berdampak nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2025). *Kabupaten Merauke Dalam Angka 2025* (B. K. Merauke (ed.)). BPS Kabupaten Merauke.
- Christanto, B. (2015). Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(3), 118–134.
- Creswell J W. (2009). RESEARCH DESIGN Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In *SAGE*. <https://doi.org/10.2307/1523157>
- Dahiri. (2018). The Impact of 1 Million Ha Rice Fields Program on Rice Production. *Jurnal Budget*, 3(1), 53–71.
- Fatimah, N., & Syamsiyah, N. (2018). Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Petani Padi di Desa Patimban, kecaatan Pusanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. *Mimbar Agribisnis*, 4(2), 184–196.
- Hasril, A., Muhammad, A. S., & Prastya, I. Y. (2021). Evaluasi Program Cetak Sawah di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. *JIANA: Ilmu Administrasi Negara*, 19(3), 29–39.
- Hastuti, E. L., & Santoso, B. (1994). Pengaruh Kondisi Keluarga Terhadap Gerak Penduduk di Pedesaan Jawa Barat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 12(1), 49–60.
- Ikwanto, A., Yusuf, & Halkis, H. M. (2019). Evaluasi Program Cetak Sawah oleh Korem 174/ATW di Merauke dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. *Junal Strategis Perang Semesta*, 5(2), 41–56.
- Jayadi, I. M. Y., Christiawan, P. I., & Sarmita, I. M. (2018). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Daya Dukung Lahan Pertanian di Desa Sambangan. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(3).
- Lestari, W., Andriany, E., & Syaputra, M. R. (2023). Evaluation Of The New Rice Field Printing Program In Order To Realize Food Security In Jambi Province. *Jurnal Khasanah Intelektual*, 7(1), 1601–1622.

- Martina, Praza, R., & Adhiana. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Rumah Tangga Pertanian Padi Sawah di Kabupaten Aceh Utara. *AgriFo*, 6(1), 31–40.
- Mustapa, L. A., Purnamadewi, Y. L., & Dharmawan, A. H. (2019). Impact and Sustainability of New Rice Field Development Program in Katingan Regency , Central Kalimantan Province. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 17(2), 123–137.
- Nurdin, F. (2021). *Analisis Pendapatan Petani Peserta program Cetak Sawah Baru dan Petani Sawah Lama (Studi Kasus di Desa Botte, kecamatan Pitu Riesa, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan)*. Universitas Hasanuddin.
- Pramudia, A. L., Untari, & Ginting, N. M. (2026). Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Lokasi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian Beras Di Pasar Wamanggu. *Agricola*, 16(1), 29–36. <https://doi.org/10.35724/ag.v16i1.7340>
- Prayoga, R. N., Lutfi, M. W., Rahardjo, S. S. P., Agung, P., Prasetyorini, L., & Asmaranto, R. (2025). Implementasi Teknologi Drone di Kelompok Tani untuk Monitoring Buka Lahan Pertanian Secara Cepat dan Akurat pada Lahan Cetak Sawah Rakyat di Desa Basarang , Kabupaten Kapuas. *Agroinotek*, 006(02), 212–218. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.agroinotek.2025.006.02.10>
- Rajagukguk, I. S., Syarifudin, J., Tulung, I., & Akbar, J. (2026). Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Analisis Kesesuaian Lahan pada Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Seluas 12 . 000 Hektar di Kabupaten Sorong. *Jurnal Jendela Ilmu*, 7(1), 22–30.
- Ramija, K. El, Listiawati, Nurzannah, S. E., & Rahmi, M. (2025). Petani Milenial, Kunci Sukses Program Brigade Pangan. *BTIP*, 4(1), 1–6.
- Rela, I. Z., & Agustina, D. (2026). Program cetak Sawah dan Keberlanjutan Lingkungan: Persepsi Masyarakat di Tahap Pra dan Kontruksi di Kabupaten Bombana. *Jurnal Ilmiah Inovasi Dan Komunikasi Pembangunan Pertanian*, 5(2), 282–296. <https://doi.org/http://doi.org/10.56189/jiikpp.v5i2.67>
- Riandjumahge, H., Riani, I. A. P., Qualyoe, F. Y. de, & Kaiwai, H. Z. (2017). Analisis Dampak Program cetak Sawah terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi di Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, IV(3), 1–17.
- Sastrawan, R., Barcia, F., & Uker, D. (2019). Persepsi masyarakat terhadap Program Percetakan Sawah Baru di Desa air Kering Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan. *NATURALIS-Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 8(1).
- Situmorang, P. V. (2024). *Evaluasi Program Cetak Sawah Baru di Kabupaten Serdang Bedagai*. Universitas Medan Area.
- Suleman, D., Alam, S., Rustam, L. O., & Setiawan, A. (2026). Evaluasi kualitas tanah sawah irigasi dan tadah hujan Di Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat. *Agricola*, 16(1), 1–8. <https://doi.org/10.35724/ag.v16i1.7106>
- Susilowati, S. H. (2016). Farmers Aging Phenomenon and Reduction in Young Labor : Its Implication for Agricultural Development. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 35–55.
- Yunianto, D. (2021). Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 687–698.